

PARTISIPASI WARGA DAN NILAI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN DAERAH: STUDI KOTA BANDUNG

Naufal Arief Budiman*, Jaliludin Muslim

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: naufalbudiman812@gmail.com*

Riwayat Artikel

Diterima: 9 November 2025

Disetujui: 9 Desember 2025

Diterbitkan: 23 Desember 2025

Abstract

Regional autonomy positions citizen participation as a key instrument for strengthening local democracy and creating public value-oriented policies. However, in practice, citizen participation often remains procedural and has limited influence on substantive policy decisions. This study aims to analyze the forms, quality, and contribution of citizen participation to public value creation in local policies in Bandung City. The study draws on theories of citizen participation, participatory governance, and public value. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that although participatory mechanisms are formally available, the quality of citizen participation remains largely symbolic and has limited impact on final policy decisions. While participation contributes to policy legitimacy, it has not yet optimally generated substantive public value. These findings highlight the need to strengthen deliberative and inclusive participatory governance to enhance public value creation in local policymaking.

Keywords: citizen participation, public value, local policy

Abstrak

Otonomi daerah menempatkan partisipasi warga sebagai instrumen penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan menciptakan kebijakan daerah yang bernilai publik. Namun, dalam praktiknya, partisipasi warga sering kali masih bersifat prosedural dan belum memberikan pengaruh substantif terhadap pengambilan keputusan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, kualitas, dan kontribusi partisipasi warga terhadap penciptaan nilai publik dalam kebijakan daerah di Kota Bandung. Kajian ini menggunakan perspektif partisipasi warga, governance partisipatif, dan teori nilai publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme partisipasi warga telah tersedia, kualitas partisipasi masih cenderung formalistik dan memiliki pengaruh terbatas terhadap keputusan akhir kebijakan. Partisipasi warga berkontribusi pada peningkatan legitimasi kebijakan, namun belum optimal dalam menciptakan nilai publik secara substantif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan governance partisipatif yang lebih deliberatif dan inklusif di tingkat pemerintahan daerah.

Kata kunci: partisipasi warga, nilai publik, kebijakan daerah

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah dalam konteks kontemporer dipahami sebagai sarana penguatan demokrasi lokal melalui peningkatan partisipasi warga dalam proses kebijakan publik (OECD,

2020). Partisipasi warga diyakini berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi kebijakan serta kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat lokal (UNDP, 2022). Dalam kajian administrasi publik mutakhir, keterlibatan masyarakat diposisikan sebagai elemen sentral dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif dan inklusif (Ansell & Torfing, 2021). Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik partisipasi publik di tingkat daerah masih cenderung bersifat prosedural dan belum berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan substantif (Quick & Bryson, 2022). Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif desentralisasi dan realitas implementasi kebijakan di pemerintahan lokal (Peters, 2021).

Konsep nilai publik menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak semata-mata diukur dari efisiensi administratif, tetapi juga dari kemampuannya mencerminkan kepentingan kolektif dan aspirasi warga (Bozeman, 2020). Nilai publik terbentuk melalui interaksi yang dinamis antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara dalam proses kebijakan yang terbuka dan partisipatif (Benington & Moore, 2021). Dalam konteks ini, partisipasi warga menjadi prasyarat utama bagi penciptaan nilai publik karena memungkinkan artikulasi kebutuhan publik secara lebih substantif (Bryson, Crosby, & Bloomberg, 2022). Namun, tanpa mekanisme partisipasi yang bermakna dan berpengaruh, kebijakan berisiko kehilangan dimensi nilai publik dan terjebak pada kepatuhan prosedural semata (Fung, 2020). Oleh karena itu, relasi antara partisipasi warga dan nilai publik menjadi isu krusial dalam kajian kebijakan daerah kontemporer (Denhardt, Denhardt, & Aristigueta, 2023).

Dalam konteks Kota Bandung, partisipasi warga dalam kebijakan daerah telah difasilitasi melalui berbagai mekanisme formal seperti musyawarah perencanaan pembangunan dan forum kewilayahan. Meskipun demikian, keterlibatan warga sering kali belum sepenuhnya tercermin dalam substansi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat cenderung berhenti pada tahap pengumpulan usulan tanpa jaminan integrasi ke dalam keputusan akhir. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara proses partisipasi yang tersedia dengan nilai publik yang dihasilkan oleh kebijakan daerah. Oleh sebab itu, permasalahan utama penelitian ini terletak pada bagaimana partisipasi warga berkontribusi terhadap penciptaan nilai publik dalam kebijakan daerah di Kota Bandung.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Quick dan Bryson (2022) menemukan bahwa dalam banyak konteks pemerintahan lokal, praktik partisipasi publik masih berada pada tingkat simbolik atau prosedural, sehingga keterlibatan warga belum sepenuhnya memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan. Selanjutnya, Fung (2020) menegaskan bahwa desain institusional partisipasi publik sangat menentukan kualitas hasil kebijakan, terutama dalam konteks pemerintahan daerah yang kompleks dan plural. Sementara itu, Osborne, Radnor, dan Nasi (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang terintegrasi dalam kerangka *public service governance* mampu meningkatkan legitimasi serta efektivitas kebijakan publik.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam memandang partisipasi warga sebagai elemen penting dalam proses kebijakan publik. Namun demikian, perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengembangan model konseptual, desain institusional partisipasi, atau konteks pelayanan publik secara umum. Penelitian ini secara spesifik mengkaji hubungan antara partisipasi warga dan penciptaan nilai publik dalam kebijakan daerah dengan lokus empiris Kota Bandung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai tingkat partisipasi, tetapi juga menelaah sejauh mana partisipasi tersebut berkontribusi terhadap nilai publik yang dihasilkan oleh kebijakan daerah.

Perbedaan fokus tersebut menegaskan originalitas penelitian ini, yaitu dengan mengintegrasikan konsep partisipasi warga dan nilai publik dalam analisis kebijakan daerah pada level pemerintahan kota. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran warga sebagai *co-creator of public value*, bukan sekadar sebagai penerima kebijakan. Selain itu, penggunaan lokus Kota Bandung memberikan kontribusi empiris baru dalam pengembangan kajian administrasi publik perkotaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan akan kebijakan daerah yang tidak hanya partisipatif secara prosedural, tetapi juga bernilai secara substantif bagi masyarakat. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi warga dan nilai publik diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola kebijakan daerah. Urgensi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya dalam memperkuat praktik *governance* partisipatif dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini relevan baik secara akademik maupun praktis.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan mekanisme partisipasi warga dalam kebijakan daerah di Kota Bandung, menilai kontribusi partisipasi warga terhadap penciptaan nilai publik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas partisipasi tersebut dalam proses kebijakan daerah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Partisipasi Warga (*Citizen Participation*)

Partisipasi warga dalam administrasi publik kontemporer dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik (Quick & Bryson, 2022). Partisipasi tidak lagi dimaknai sekadar kehadiran formal dalam forum kebijakan, melainkan sebagai kontribusi substantif dalam pengambilan keputusan publik (Fung, 2020). Dalam konteks pemerintahan daerah, partisipasi warga berfungsi untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan agenda kebijakan pemerintah lokal (OECD, 2020). Kualitas partisipasi ditentukan oleh sejauh mana aspirasi warga dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, partisipasi warga menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan daerah yang responsif dan inklusif.

Indikator Partisipasi Warga:

- Tingkat keterlibatan warga dalam proses kebijakan
- Akses masyarakat terhadap forum partisipasi
- Kesempatan warga menyampaikan aspirasi
- Pengaruh aspirasi warga terhadap keputusan kebijakan

Nilai Publik (*Public Value*)

Teori nilai publik memandang kebijakan publik sebagai sarana utama pemerintah dalam menciptakan manfaat kolektif yang dirasakan oleh masyarakat luas (Moore & Benington, 2021). Nilai publik tidak hanya mencakup hasil kebijakan, tetapi juga proses dan legitimasi yang menyertainya (Bozeman, 2020). Dalam perspektif ini, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan berbagai kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang bernilai bagi publik. Penciptaan nilai publik menuntut adanya keterlibatan warga secara aktif dalam proses kebijakan agar kebijakan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi warga merupakan prasyarat utama dalam proses penciptaan nilai publik dalam kebijakan daerah.

Indikator Nilai Publik:

- Responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat
- Manfaat kebijakan bagi kepentingan publik
- Legitimasi kebijakan di mata masyarakat
- Keadilan dan inklusivitas kebijakan

Governance Partisipatif (*Participatory Governance*)

Governance partisipatif menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara dalam proses pengambilan kebijakan publik (Ansell & Torfing, 2021). Model ini

memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi berbagai aktor dalam jejaring pemerintahan yang bersifat horizontal. Dalam konteks pemerintahan daerah, governance partisipatif memungkinkan warga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam perumusan kebijakan. Kualitas governance partisipatif ditentukan oleh keterbukaan, akuntabilitas, dan kesetaraan peran antar aktor yang terlibat. Oleh karena itu, governance partisipatif menjadi kerangka penting dalam menganalisis efektivitas partisipasi warga dalam kebijakan daerah.

Indikator Governance Partisipatif:

- Keterbukaan proses pengambilan kebijakan
- Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat
- Akuntabilitas aktor kebijakan
- Kesetaraan peran dalam proses kebijakan

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, makna, dan dinamika partisipasi warga dalam kebijakan daerah serta kontribusinya terhadap penciptaan nilai publik (Creswell & Poth, 2021). Pendekatan studi kasus relevan digunakan karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena kebijakan secara kontekstual dan holistik pada satu lokus tertentu, yaitu Kota Bandung (Yin, 2023). Studi kasus juga tepat untuk mengkaji interaksi aktor, mekanisme partisipasi, dan hasil kebijakan dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan demikian, metode ini relevan untuk menjawab permasalahan penelitian yang bersifat prosedural dan kontekstual.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengalaman dan persepsi aktor kebijakan terkait partisipasi warga dan nilai publik (Guest, Namey, & Saldaña, 2024). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik partisipasi warga dalam forum kebijakan daerah. Studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen kebijakan, laporan perencanaan daerah, dan dokumen resmi lain yang relevan guna memperkuat data lapangan (Bowen, 2020).

Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memilih informan yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam proses kebijakan daerah (Palinkas et al., 2020). Informan penelitian meliputi aparatur pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, serta aktor lokal yang terlibat dalam forum partisipasi kebijakan. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, keterlibatan, dan pengetahuan terhadap isu partisipasi warga dan kebijakan daerah. Dengan teknik ini, data yang diperoleh diharapkan mampu merepresentasikan dinamika partisipasi warga secara mendalam.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Analisis tematik dipilih karena mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan pola-pola makna yang muncul dari data kualitatif secara sistematis (Braun & Clarke, 2021). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengkodean, pengelompokan tema, serta penarikan kesimpulan. Teknik ini relevan untuk mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori partisipasi warga, governance partisipatif, dan nilai publik. Dengan analisis tematik, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam mengenai kontribusi partisipasi warga terhadap penciptaan nilai publik dalam kebijakan daerah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Mekanisme Partisipasi Warga dalam Kebijakan Daerah di Kota Bandung

Partisipasi warga dalam kebijakan daerah di Kota Bandung secara formal difasilitasi melalui berbagai saluran, terutama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan serta forum-forum kewilayahan yang melibatkan perwakilan masyarakat. Mekanisme ini memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, usulan, dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam forum tersebut cenderung terpusat pada kelompok tertentu, seperti pengurus RT/RW atau tokoh masyarakat, sehingga keterlibatan warga secara luas masih terbatas. Selain itu, alur penyampaian aspirasi bersifat satu arah, di mana masyarakat menyampaikan usulan tanpa memperoleh umpan balik yang memadai terkait tindak lanjut usulan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun saluran partisipasi tersedia, mekanisme partisipasi belum sepenuhnya menjamin keterlibatan warga yang bermakna.

Dalam setiap tahapan kebijakan daerah, peran masyarakat di Kota Bandung umumnya lebih dominan pada tahap perencanaan, sementara keterlibatan pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan masih relatif minim. Tingkat keterbukaan dan akses partisipasi memang telah diperluas melalui forum formal dan mekanisme kelembagaan yang tersedia, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan transparansi dalam proses seleksi dan penetapan usulan kebijakan. Warga sering kali tidak mengetahui alasan diterima atau ditolaknya aspirasi yang telah disampaikan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa partisipasi hanya bersifat administratif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keterbukaan akses partisipasi dengan kualitas partisipasi itu sendiri. Dengan demikian, bentuk dan mekanisme partisipasi warga dalam kebijakan daerah di Kota Bandung masih perlu diperkuat agar tidak hanya inklusif secara prosedural, tetapi juga berpengaruh secara substantif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi warga dalam kebijakan daerah masih didominasi oleh pola partisipasi formal dan perwakilan elit lokal. Penelitian Quick dan Bryson (2022) menemukan bahwa forum partisipatif di tingkat pemerintahan lokal sering kali hanya melibatkan aktor-aktor tertentu, sehingga membatasi keterlibatan warga secara luas dan berdampak pada rendahnya pengaruh masyarakat terhadap keputusan kebijakan. Temuan serupa juga disampaikan oleh Fung (2020) yang menegaskan bahwa tanpa mekanisme umpan balik dan transparansi yang memadai, partisipasi publik cenderung berhenti pada tahap penyampaian aspirasi tanpa integrasi nyata dalam pengambilan keputusan. Selain itu, studi OECD (2020) mengenai partisipasi publik di pemerintah daerah menunjukkan bahwa keterbukaan akses partisipasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi apabila proses seleksi usulan kebijakan tidak dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberadaan saluran partisipasi formal di tingkat daerah, termasuk di Kota Bandung, belum secara otomatis menjamin partisipasi warga yang substantif dan berpengaruh terhadap kebijakan publik.

Kualitas Partisipasi Warga dalam Proses Pengambilan Kebijakan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirasi warga dalam proses kebijakan daerah di Kota Bandung belum sepenuhnya dipertimbangkan secara substantif dalam pengambilan keputusan. Meskipun masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan melalui berbagai forum partisipatif, tidak seluruh aspirasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan atau program yang direalisasikan. Keterbatasan ini tercermin dari minimnya informasi yang diterima warga mengenai proses seleksi usulan dan alasan kebijakan tertentu diprioritaskan. Akibatnya, warga sulit menilai sejauh mana aspirasi mereka benar-benar memengaruhi kebijakan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme partisipasi lebih berfungsi

sebagai sarana penjangkaran aspirasi daripada sebagai ruang deliberasi yang berpengaruh terhadap keputusan akhir.

Lebih lanjut, pengaruh warga terhadap keputusan kebijakan daerah cenderung bersifat terbatas dan tidak langsung. Peran masyarakat umumnya berhenti pada tahap awal perencanaan, sementara keputusan strategis tetap didominasi oleh aktor pemerintah dan elite lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi warga lebih banyak bersifat formalitas administratif dibandingkan keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme yang memungkinkan warga bernegosiasi, memberikan masukan lanjutan, atau mengevaluasi keputusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kualitas partisipasi warga dalam kebijakan daerah di Kota Bandung masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap arah dan substansi kebijakan publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi warga dalam kebijakan daerah di Kota Bandung masih cenderung bersifat formalitas dan memiliki pengaruh terbatas terhadap keputusan akhir, yang berbeda dengan hasil sejumlah penelitian terdahulu. Studi yang dilakukan oleh Nabatchi dan Leighninger (2020) menemukan bahwa ketika forum partisipatif dirancang secara deliberatif dan inklusif, warga dapat memiliki pengaruh nyata terhadap arah kebijakan publik, termasuk pada tahap pengambilan keputusan. Penelitian lain oleh Ansell dan Torfing (2021) juga menunjukkan bahwa praktik governance partisipatif di beberapa pemerintah kota mampu mendorong keterlibatan warga secara substantif melalui kolaborasi yang setara antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kualitas partisipasi warga sangat dipengaruhi oleh desain institusional dan komitmen aktor kebijakan dalam membuka ruang deliberasi yang bermakna. Dengan demikian, kontradiksi antara temuan penelitian ini dan penelitian terdahulu menegaskan bahwa keberadaan forum partisipatif saja tidak cukup, melainkan harus disertai mekanisme yang memungkinkan warga memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan kebijakan daerah.

Peran Governance Partisipatif dalam Menghubungkan Warga dan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Bandung telah terbentuk melalui berbagai forum partisipatif, namun kolaborasi tersebut belum sepenuhnya bersifat setara. Pemerintah daerah masih memegang peran dominan dalam menentukan agenda dan arah kebijakan, sementara masyarakat lebih sering diposisikan sebagai pemberi masukan. Peran aktor non-negara, seperti tokoh masyarakat dan forum warga, berfungsi sebagai perantara antara warga dan pemerintah, tetapi pengaruhnya dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Tokoh masyarakat cenderung berperan dalam mengonsolidasikan aspirasi warga, namun belum sepenuhnya dilibatkan sebagai mitra deliberatif dalam proses kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa governance partisipatif di Kota Bandung masih berorientasi pada koordinasi, bukan kolaborasi substantif.

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi dalam proses kebijakan daerah belum sepenuhnya mendukung penguatan governance partisipatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informasi terkait proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat belum disampaikan secara terbuka dan sistematis kepada warga. Keterbatasan transparansi ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjelaskan dasar pertimbangan kebijakan yang diambil. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap proses partisipatif cenderung melemah dan partisipasi warga berpotensi bersifat pasif. Dengan demikian, peran governance partisipatif dalam menghubungkan warga dan pemerintah daerah di Kota Bandung masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kolaborasi yang akuntabel dan transparan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroti keterbatasan praktik governance partisipatif dalam pemerintahan daerah. Ansell dan Torfing (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sering kali masih

bersifat asimetris, di mana pemerintah tetap menjadi aktor dominan dalam menentukan agenda kebijakan. Penelitian oleh Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2022) juga menemukan bahwa peran aktor non-negara dalam forum kolaboratif kerap dibatasi pada fungsi konsultatif, sehingga belum mampu memengaruhi keputusan strategis secara signifikan. Selain itu, studi OECD (2020) menegaskan bahwa lemahnya transparansi dan mekanisme akuntabilitas dalam proses kebijakan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik dan efektivitas partisipasi warga. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa governance partisipatif di tingkat daerah, termasuk di Kota Bandung, masih menghadapi tantangan struktural dalam membangun kolaborasi yang setara, transparan, dan akuntabel antara pemerintah dan masyarakat.

Kontribusi Partisipasi Warga terhadap Penciptaan Nilai Publik dalam Kebijakan Daerah Kota Bandung

Tabel 1. Kontribusi partisipasi warga

Aspek Analisis	Temuan Penelitian	Analisis Kritis	Implikasi terhadap Nilai Publik
Dampak Partisipasi terhadap Kualitas Kebijakan	Partisipasi warga berkontribusi pada pengayaan informasi dan identifikasi kebutuhan lokal, terutama pada tahap perencanaan kebijakan	Kontribusi tersebut belum optimal karena aspirasi warga tidak seluruhnya diintegrasikan ke dalam keputusan akhir kebijakan	Kualitas kebijakan meningkat secara parsial, namun belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik secara menyeluruh
Pencerminan Kebutuhan Warga dalam Kebijakan	Sebagian kebijakan daerah telah menyesuaikan dengan kebutuhan warga, terutama yang bersifat teknis dan kewilayahan	Kebutuhan strategis dan jangka panjang warga cenderung tersisih oleh prioritas pemerintah daerah	Kebijakan mencerminkan kebutuhan warga secara selektif, sehingga nilai publik yang dihasilkan masih terbatas
Manfaat Kebijakan bagi Masyarakat	Kebijakan memberikan manfaat langsung pada kelompok masyarakat tertentu	Distribusi manfaat belum merata dan masih bergantung pada posisi dan representasi warga dalam forum partisipatif	Nilai manfaat publik tercipta, tetapi belum inklusif
Keadilan dalam Proses dan Hasil Kebijakan	Akses partisipasi terbuka secara formal bagi warga	Dalam praktiknya, tidak semua kelompok memiliki kapasitas dan kesempatan yang sama untuk memengaruhi kebijakan	Nilai keadilan prosedural ada, namun keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud
Legitimasi Kebijakan Daerah	Kebijakan memiliki legitimasi administratif dan formal	Minimnya transparansi dan umpan balik melemahkan legitimasi sosial kebijakan di mata masyarakat	Legitimasi publik terbentuk secara formal, tetapi belum kuat secara sosial

Sumber: diolah peneliti, 2025

Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam kebijakan daerah di Kota Bandung telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan nilai publik, namun kontribusi tersebut masih bersifat terbatas dan belum optimal. Partisipasi warga mampu meningkatkan kualitas kebijakan pada tahap perencanaan melalui pengayaan informasi dan identifikasi kebutuhan lokal, tetapi keterbatasan integrasi aspirasi warga ke dalam keputusan akhir menyebabkan kualitas kebijakan hanya meningkat secara parsial. Kebijakan daerah juga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga secara menyeluruh karena prioritas pemerintah masih mendominasi arah kebijakan, sehingga nilai manfaat dan keadilan yang dihasilkan cenderung selektif. Selain itu, meskipun akses partisipasi dibuka secara formal, ketimpangan kapasitas dan representasi warga memengaruhi pemerataan manfaat kebijakan. Kondisi ini berdampak pada legitimasi kebijakan yang lebih kuat secara administratif dibandingkan legitimasi sosial, sehingga menegaskan bahwa partisipasi warga perlu diperkuat secara substantif agar mampu menghasilkan nilai publik yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kontribusi partisipasi warga terhadap penciptaan nilai publik masih terbatas dan belum inklusif berbeda dengan sejumlah temuan penelitian terdahulu. Studi yang dilakukan oleh Nabatchi dan Amsler (2020) menunjukkan bahwa partisipasi warga yang dirancang secara deliberatif dan berkelanjutan mampu menghasilkan kebijakan yang secara substansial mencerminkan kebutuhan publik serta meningkatkan legitimasi sosial kebijakan. Penelitian lain oleh Bryson, Crosby, dan Stone (2021) juga menemukan bahwa kolaborasi intensif antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan nilai publik yang lebih adil dan merata, terutama dalam konteks pemerintahan kota. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan nilai publik dalam kebijakan daerah di Kota Bandung bukan disebabkan oleh partisipasi warga itu sendiri, melainkan oleh lemahnya mekanisme integrasi aspirasi dan ketimpangan peran dalam proses kebijakan. Dengan demikian, kontradiksi ini menegaskan bahwa partisipasi warga hanya akan berkontribusi optimal terhadap penciptaan nilai publik apabila didukung oleh desain governance partisipatif yang kuat, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi warga dalam kebijakan daerah di Kota Bandung telah difasilitasi melalui berbagai mekanisme formal, namun kualitas partisipasi tersebut masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya berkontribusi secara substantif terhadap pengambilan keputusan dan penciptaan nilai publik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun warga terlibat dalam tahap perencanaan, pengaruh mereka terhadap keputusan akhir kebijakan relatif terbatas, sehingga nilai publik yang dihasilkan dalam bentuk manfaat, keadilan, dan legitimasi masih bersifat parsial. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis bentuk partisipasi warga, perannya dalam proses kebijakan, serta kontribusinya terhadap penciptaan nilai publik dapat dikatakan telah tercapai, sekaligus memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan perspektif partisipasi warga dan nilai publik dalam konteks empiris pemerintahan kota.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat desain governance partisipatif yang lebih deliberatif, transparan, dan akuntabel agar aspirasi warga dapat terintegrasi secara nyata dalam kebijakan daerah, sementara penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi pendekatan komparatif antar daerah atau menggunakan metode campuran untuk menangkap dinamika partisipasi yang lebih luas dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian ini yang masih berfokus pada satu lokus dan pendekatan kualitatif; implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan pentingnya menjadikan partisipasi warga sebagai instrumen strategis penciptaan nilai publik, bukan sekadar prosedur administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah.

REFERENSI

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Cambridge University Press.
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2020). *Public participation for 21st century democracy*. Jossey-Bass.
- Benington, J., & Moore, M. H. (2021). *Public value: Theory and practice*. Red Globe Press.
- Bowen, G. A. (2020). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 20(2), 125–140.
- Bozeman, B. (2020). *Public values: Citizens' perspective*. Georgetown University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2022). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 82(2), 300–312.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., Denhardt, R. B., & Aristigueta, M. P. (2023). *Managing human behavior in public and nonprofit organizations* (5th ed.). CQ Press.
- Fung, A. (2020). The principle of affected interests: An interpretation and defense. *Democracy Journal*, 56, 45–58.
- Guest, G., Namey, E., & Saldaña, J. (2024). *Collecting and analyzing qualitative data at scale*. SAGE Publications.
- Moore, M. H., & Benington, J. (2021). *Public value: Theory and practice*. Red Globe Press.
- OECD. (2020). *Innovative citizen participation and new democratic institutions: Catching the deliberative wave*. OECD Publishing.
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2021). A new theory for public service management? Toward a (public) service-dominant approach. *American Review of Public Administration*, 51(2), 89–104.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2020). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 47(1), 1–11.
- Peters, B. G. (2021). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing.
- Quick, K. S., & Bryson, J. M. (2022). Public participation. In G. T. Jennings & J. Hall (Eds.), *The Oxford handbook of public management* (pp. 1–23). Oxford University Press.
- UNDP. (2022). *People-centred governance: A framework for democratic participation*. United Nations Development Programme.
- Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications.